

ANALISIS PENERAPAN *E-CATALOGUE* DI PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK

ANALYSIS OF E-CATALOGUE IMPLEMENTATIONIN GRESIK DISTRICT GOVERNMENT

Muhammad Rifqi Zam Zami¹, Dian Arlupi Utami²

¹Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: muhammadrifqi.20087@mhs.unesa.ac.id

²Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya
email: dianarlupi@unesa.ac.id

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerapkan aplikasi E-Catalogue untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Tujuan Penelitian ini menganalisis penerapan E-Catalogue dengan dasar teori Elemen Sukses E-government dari Indrajit. Metode penelitian deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari petugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, DISKOPERINDAG dan beberapa pengguna. Lokasi penelitian di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, DISKOPERINDAG Kabupaten Gresik. Analisis data menggunakan teknik Miles, Huberman, dan Saldana dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk elemen support dukungan terhadap penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik cukup kuat, kesungguhan ini terlihat dari dukungan pimpinan daerah. Namun sosialisasi edukasi dan koordinasi antar OPD perlu diperkuat untuk UMKM serta minimnya penyebaran informasi tentang E-Catalogue kepada masyarakat luas dan Proses verifikasi yang hanya dilakukan secara offline di kantor BPBJ. Kemudian capacity sudah sesuai beberapa aspek infrastruktur Teknologi Informasi BPBJ menyediakan komputer dan ruang yang memadai untuk pengguna E-Catalogue. Dan mendapat respon positif dari pengguna, namun masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya, seperti beberapa fitur aplikasi E-Catalogue yang tidak user friendly, dan masih sering terjadi sistem down yang menghambat pelayanan. Serta kompetensi pegawai BPBJ yang baik dalam menjalankan tugas nya dalam memberikan pelayanan penerapan E-Catalogue. Selanjutnya value E-Catalogue memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM, terutama peningkatan kualitas layanan publik. Kemudian disarankan untuk melakukan survei secara berkala guna mengukur kepuasan pengguna dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Kata Kunci: E-Catalogue, Penerapan, Pengadaan Barang/Jasa

Abstract

The Gresik Regency government has implemented an E-Catalogue application to streamline the procurement of goods and services within the government. The aim is to improve efficiency, transparency, and encourage community participation, especially MSMEs. This study analyzes the implementation of E-Catalogue based on Indrajit's E-government Success Elements theory. Research findings indicate that there is strong support for the implementation of the E-Catalogue in Gresik Regency. This commitment is evident in the support provided by local leaders. However, socialization, education, and coordination among Regional Work Units (OPDs) need to be strengthened for MSMEs, and there is a lack of information dissemination about the E-Catalogue to the wider community. Furthermore, the verification process is still conducted offline at the Regional Procurement Service Board (BPBJ) office. In terms of capacity, several aspects of the BPBJ's information technology infrastructure are adequate, providing computers and a suitable space for E-Catalogue users. The system has received a positive response from users, but there are still challenges in its utilization, such as some E-Catalogue application features that are not user-friendly and frequent system downtime that hinders services. Additionally, the BPBJ staff have good competence in carrying out their duties in providing E-Catalogue implementation services. Furthermore, the E-Catalogue provides significant benefits to MSMEs, especially in terms of improving public service quality. It is recommended to conduct regular surveys to measure user satisfaction and identify areas that need improvement.

Keywords: *E-Catalogue, Goods/Services Procurement, Implementation*

Pendahuluan

Interaksi antara pemerintah dan masyarakat berkembang dengan cepat di era komputer dan internet saat ini. Salah satu fenomena yang menarik adalah peningkatan penggunaan platform online untuk berbagai layanan publik. Perkembangan teknologi informatika dan ilmu pengetahuan menuntut pemerintah untuk meningkatkan layanan publik. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yang menetapkan tanggung jawab badan pemerintah pusat dan daerah untuk menitikberatkan pada pentingnya layanan pemerintah yang berbasis internet telah memulai pelaksanaan di Indonesia. Selain itu, Peraturan Presiden (perpres) No.95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) juga salah satu undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sebagai respons terhadap era digitalisasi yang semakin berkembang serta bertambahnya kebutuhan akan pelayanan publik yang optimal. Perpres No.95 Tahun 2018 menetapkan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah organisasi pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan e-government dimulai dengan menyediakan layanan yang mudah diakses, khususnya dalam hal penyediaan informasi dan dokumen yang terkomputerisasi tentang aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik. Implementasi E-government juga melibatkan kerja sama antar bagian birokrasi yang terus beradaptasi dengan perubahan dinamis di lingkungan eksternal organisasi serta menanggapi tuntutan untuk melakukan perubahan. Secara jelas, penerapan E-government merupakan bagian dari transformasi mentalitas birokrasi, yang sebelumnya dianggap lamban dan rentan terhadap kesalahan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kemajuan sistem informasi dan data serta perkembangan zaman, yang kemudian disesuaikan dengan proses birokrasi saat ini (Muliawaty and Hendryawan 2020). Berdasarkan dari pernyataan diatas Salah satu bentuk

e-government yang populer adalah G2C (*Government to Citizen*). G2C menyediakan platform online bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti pengurusan dokumen, pembayaran pajak, dan pendaftaran program bantuan sosial. G2C terbukti dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Seiring dengan perkembangan tersebut, Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam sektor ekonomi, baik dalam hal materil maupun non-materil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang meningkat naik menurut data pada triwulan I 2024 sebesar 5,11%, dari triwulan sebelumnya (Badan Pusat Statistika 2024). Menunjukkan juga aktivitas ada peningkatan kebutuhan akan barang dan jasa dari sektor publik, termasuk juga kebutuhan pemerintah. Kebutuhan pengadaan produk dan jasa oleh pemerintah merupakan proyeksi mendorong pertumbuhan ekonomi baik di pusat dan daerah. Ini karena aktivitas tersebut melibatkan banyak pihak dan mendorong perputaran Ekonomi di masyarakat (Eman, Rachman, and Pangemanan 2023).

Melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, UMKM secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fleksibilitas dan kemampuannya beradaptasi, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pandemi COVID-19 telah memberikan momentum bagi UMKM. Untuk bertransformasi digital, sehingga mereka dapat bangkit lebih kuat pasca pandemi (Eman, Rachman, and Pangemanan 2023). Pengadaan barang dan jasa pemerintah sebuah proyeksi pertumbuhan ekonomi bagi UMKM, dan mereka berupaya kembali bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19. Peluang yang lebih besar bagi UMKM dapat diberikan dalam proyek pemerintah dengan memastikan proses pengadaan yang cepat, transparan, dan efisien. Hal ini akan memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan kompetitif, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas (Ulut, Amitran, and Foenay 2023). Maka dari pada itu Di era digital ini, Pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan berbagai hal, seperti proses pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari pelayanan publik yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Suryono et al. 2021).

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan sistem pengadaan barang dan jasa untuk membuat keuangan negara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penerapan proses pengadaan elektronik yang terintegrasi dengan teknologi informasi sesuai regulasi menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu upaya agar produktivitas pengadaan barang dan jasa yang dikelola pemerintah menjadi efisien dengan menggunakan *E-Catalogue*. Tujuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah) adalah untuk meningkatkan penggunaan produk lokal dan transaksi elektronik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada Tahun 2023, LKPP menargetkan bahwa 90% pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara online melalui *E-Catalogue* (Marwarni Mega, Gamaputra Gading, and Meilinda Selvi Diana 2020). Katalog Elektronik adalah sistem informasi yang dibuat oleh LKPP untuk membantu dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. *E-Catalogue* menyediakan informasi tentang barang dan jasa seperti jenis spesifikasi teknis, TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), produk dalam negeri, SNI (Standart Nasional Indonesia), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia,

dll. Karena itu *E- Catalogue* diharapkan pemilihan barang/jasa secara langsung akan lebih mudah dan lebih cepat Prosesnya juga lebih transparan dan tercatat secara elektronik. Diharapkan bahwa *E-Catalogue* akan membantu UMKM lokal dan membuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan “Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dan koperasi dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan koperasi dalam katalog elektronik”. Karena itu, lembaga penyedia layanan publik, terutama yang berada di pemerintah daerah, harus menerapkan dan mengembangkan sistem e-government. Penyelenggaraan e-government di Kabupaten Gresik telah diatur pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. “Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat dipercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diterapkan”. Untuk menaikkan koordinasi dan efisiensi sistem e-government, perlu dilakukan pengaturan dan manajemen yang baik atas sistem tersebut di tingkat daerah. Dengan demikian bahwa Pemerintahan Kabupaten Gresik dapat segera pelaksanaan proses transformasi menuju government yang responsive. Pemerintah Kabupaten Gresik menerapkan aplikasi *E- Catalogue* Dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta mendorong partisipasi masyarakat umum, terutama para penyedia. UMKM dapat dengan mudah mempromosikan produknya dan menjangkau pelanggan yang lebih luas secara online dengan menggunakan *E-Catalogue*. Hal ini diharapkan dapat memulihkan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Gresik mengimplementasikan produk lokal terkemuka dalam proses pengadaan barang dan jasa sebagai dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Selain mematuhi tema APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2022 yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Menurut Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan koperasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gresik di berbagai sektor melaksanakan pembinaan UMKM lewat pelatihan teknologi tepat guna. *E-Catalogue* ini diharapkan menjadi solusi untuk mempermudah UMKM di Gresik dalam memasarkan produk mereka kepada pemerintah daerah dan instansi terkait. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik meliputi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian perdagangan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), terus mengoptimalkan penggunaan *E-Catalogue* Lokal. BPBJ memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan administrasi *E-Catalogue*, Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal dan melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan atau konsultasi penggunaan sistem informasi *E-Catalogue*, bagi penyedia barang/jasa, termasuk UMKM, sementara dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian perdagangan sebagai Menyusun, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, perindustri, dan perdagangan. Berdasarkan pra-observasi informasi yang penulis dapatkan terkait permasalahan di antaranya kurangnya kerja sama antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM rendahnya

pemahaman pelaku UMKM menjadi hambatan dalam upaya untuk mengoptimalkan potensi pasar digital, berikut informasi berdasarkan temuan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu pegawai di Bagian pengadaan barang dan jasa sekeretariat daerah kabupaten Gresik menyatakan bahwa masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam menggunakan E-Catalogue, terutama dalam hal pendaftaran dan penambahan produk. Kendalanya terletak pada proses pendaftaran yang rumit, di mana pengguna harus membuka 3 website berbeda dan menyinkronkan data mereka. Masalah semakin bertambah karena banyak pelaku UMKM yang usianya sudah lanjut dan kurang menguasai teknologi, sehingga mereka kesulitan memahami proses tersebut. Oleh karena itu, seringkali kami mengundang mereka untuk datang kembali pada hari lain guna mengikuti pelatihan dan bimbingan, seringkali dengan didampingi oleh anak atau kerabat yang lebih muda untuk memberikan bantuan.

Selain itu Minimnya penyebaran informasi tentang E-Catalogue kepada masyarakat luas membuat kurangnya memahami bagaimana cara menerapkan E-Catalogue dan bagaimana pembuatannya. Terkait persyaratan yang dirasa rumit sehingga untuk pembuatan akun e-catalogue terasa menyulitkan. Hal ini dapat membatasi jangkauan manfaat E-Catalogue dan menghambat partisipasi masyarakat. Sehingga dapat menyebabkan Banyak masyarakat yang kesusahan dalam mengoperasikan E-Catalogue terkait dengan informasi atau spesifikasi produk yang harus mereka masukan. Proses verifikasi data masih dilakukan secara offline, mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor. Hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor. Aplikasi tidak user friendly bagi pelaku UMKM karena masih ada yang keluhan terkait menu fitur di dalam aplikasi E-Catalogue dan masih sering terjadi sistem down yang menghambat pelayanan. Padahal dengan menggunakan aplikasi E-Catalogue diharapkan mempermudah masyarakat sekaligus menayadarkan masyarakat tentang pentingnya ilmu teknologi. Hal ini dapat membatasi jangkauan manfaat E-Catalogue dan menghambat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam melalui sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir karena penting bagi peneliti untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkat permasalahan tersebut berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penulisan dengan “ANALISIS PENERAPAN *E-CATALOGUE* DI PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK”.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dalam ilmu sosial yang mengamati situasi secara alami dan berlandaskan pada pemahaman pengalaman manusia (Abdussamad 2021). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami secara mendalam masalah-masalah terkait dengan tujuan implementasi Layanan E-Catalogue, bukan berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak terkait. Lokasi penelitian ini bertempat di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang merupakan operator dari layanan E-Catalogue. dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian dan Perdagangan menjadi pengawas dalam pembinaan pelaku bisnis. Focus penelitian adalah pada Analisis Penerapan Aplikasi E-Catalogue di Pemerintahan Kabupaten Gresik sehingga dapat mendeskripsikan penerapan E-government melalui E-Catalogue dengan menggunakan teori

dari Harvard JFK School of Government Bahwa dalam menentukan keberhasilan penerapan e-government yang dilaksanakan ada tiga aspek untuk diterapkan adalah *Support, Capacity, Value* (indrajit 2019). Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, melalui Wawancara dengan pihak terkait seperti: Fungsional Muda PBJ Ahli Muda Koordinator LPSE, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagai pengelola sistem, Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, serta pengguna E-Catalogue. Data sekunder adalah bentuk dokumen-dokumen yang tersusun secara paten untuk menunjang peneliti (Syahza and Riau 2021).

Untuk mencapai tujuan penelitian data dikumpulkan menggunakan tiga pendekatanyaitu observasi yaitu peneliti dalam mencari data dengan ikut terlibat dalam kegiatan melayani masyarakat saat menggunakan Layanan E-Catalogue, kemudian peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mewawancarai langsung: Pegawai Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat daerah Kabupaten Gresik, Kabid Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tiga Masyarakat daerah Kab.Gresik pengguna aplikasi E-Catalogue dan analisis dokumen seperti Surat Keputusan Bupati, SOP Verifikasi dan Registrasi, dan tutorial penggunaan aplikasi *E- Catalogue*. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan komponen adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Teknologi digital mengubah banyak hal, termasuk cara pemerintah bekerja Salah satu contohnya adalah digitalisasi yang mengubah cara kerja manual menjadi berbasis elektronik, seperti melalui E-Catalogue . yang di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini merupakan regulasi induk yang mengatur tentang seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk di dalamnya penggunaan E-Catalogue.

E-Catalogue di Indonesia di buat oleh pemerintahan pusat hasil dengan LKPP sebagai penanggung jawab nasional. Kemudian diterapkan untuk pada setiap instansi pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik, selaras dengan arahan pemerintah pusat, telah menerapkan E-Catalogue merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem pengadaan yang mudah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Gresik meliputi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindag serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terus mengoptimalkan penggunaan E-Catalogue Lokal.

Dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, diharapkan E-Catalogue dapat memberikan manfaat optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun masih di temukan beberapa kendala dalam penerapan E-Catalogue ini seperti Kurangnya sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait berkas berkas perizinan untuk sebagai akses menjadi pengguna E-Catalogue. Dan Beberapa masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan E-Catalogue , terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Maka dari pada itu untuk mendiskripsikan dan menganalisis penerapan E-Catalogue di Pemerintahan Kabupaten Gresik dengan menggunakan teori dari Harvard JFK School of Government (indrajit 2019) yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Support

Dalam indikator support menurut (indrajit 2019) Pemerintah memegang peran kunci dalam mendorong kemajuan e-government. Tanpa dukungan politik yang kuat, program-program *e-government* akan terhambat. Sistem birokrasi yang umumnya mengikuti model *top-down*, mengharuskan dorongan *e-government* dimulai dari pucuk pimpinan.

Disepakatinya Program atas kerangka *e-government* diakui sebagai kunci penting bagi kesuksesan suatu negara atau pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi mereka. Melalui observasi dan wawancara, penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam penerapan E-Katalog di Kabupaten Gresik, menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mendukung UMKM dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan arahan dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, berbagai upaya implementasi seperti sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM, serta hasil dan dampak positif yang terlihat seperti tingginya antusiasme UMKM dan harapan untuk mendorong penjualan produk dalam negeri dan memberdayakan UMKM. Secara keseluruhan, penerapan *E-Catalogue* di Kabupaten Gresik menunjukkan kesesuaian dengan indikator dari (Permata 2020) yaitu "Kunci utama keberhasilan penerapan e-government terletak pada kualitas kepemimpinan baik dari pusat maupun level proyek maka dari itu, penting untuk memberikan prioritas tinggi untuk inisiatif membangun sebagaimana halnya dengan faktor-faktor sukses lainnya." dan menurut (indrajit 2019) Kesepakatan atas kerangka e-government diakui sebagai kunci penting bagi kesuksesan suatu negara atau pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi mereka. Para pemimpin di kedua tingkatan ini harus memiliki berbagai kompetensi yang diperlukan untuk memastikan implementasi e-government yang terarah, terukur, dan akuntabel. Adapun upaya yang diberikan yaitu sebuah anggaran yang dikeluarkan dalam penerapan E-Catalogue.

Dialokasikan segala sumber daya yang efektif berkontribusi pada Good governance yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian berikutnya yang dialokasikan dalam Mensukseskan penerapan E-Catalogue ini yaitu BPBJ bertanggung jawab atas pengelolaan E-Catalogue, termasuk pendaftaran dan verifikasi penyedia, penyediaan informasi dan panduan, pemantauan kinerja, dan dukungan teknis. Kualitas layanan E-Catalogue diukur berdasarkan ketepatan waktu dalam menyelesaikan proses, mulai dari pendaftaran hingga produk tayang di platform. Waktu sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur) Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas, lama proses pendaftaran awal hingga produk tayang umumnya kurang dari satu jam. Kendala seperti gangguan jaringan atau server dapat memperlambat proses, namun diupayakan secepat mungkin untuk diatasi. Para pengguna E-Catalogue seperti Ibu Eti Rohmawati, Mbak Gabriella, Mbak Anisa, merasa puas dengan pelayanan E-Catalogue. Mereka menilai sarana prasarana memadai, proses pendaftaran cepat, dan waktu yang dibutuhkan standar. Meskipun ada kendala teknis dalam melakukan verifikasi secara offline karena memakan waktu bagi pelaku UMKM dikarenakan jarak yang dimana dalam hal ini tidak bisa diwakilkan seperti pembuatan NIB dan PITRT yang bisa melibatkan kecamatan di tiap daerah sedangkan untuk verifikasi data ini wewenang sepenuhnya dipegang oleh pihak BPBJ tidak bisa diwakilkan. Aspek waktu dalam *E-Catalogue* tergolong cukup baik, Dalam hal ini sudah sejalan dengan teori dari (Permata 2020) Waktu adalah elemen krusial dalam kesuksesan e-government. Proses implementasi memerlukan perencanaan yang cermat, pelaksanaan tepat pada

waktunya, dan evaluasi yang berkelanjutan. E-Catalogue Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang baik dalam hal ketepatan waktu pendaftaran.

Selain itu juga informasi yang disampaikan dalam mensukseskan E-Catalogue. Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, berkomitmen untuk memberikan informasi kepada pelaku UMKM terkait E-Catalogue. Upaya ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website LPSE Gresik, dan layanan helpdesk Whatsapp memberikan bantuan dan panduan kepada UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi.

Media sosial seperti Instagram dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi peluang pengadaan, tips mengikuti dan berita terbaru terkait Penerapan E-Catalogue. Hal ini membantu UMKM dalam mendapatkan informasi yang relevan dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap sistem E-Catalogue. Tertera juga di bio instagram informasi layanan helpdesk no yang bisa dihubungi, serta alamat kantor yang bisa dikunjungi, dan survey kepuasan masyarakat. meskipun instagram BPBJ telah memberikan informasi yang informatif, akan tetapi instagram BPBJ masih belum terlalu aktif dikarenakan baru di buat pada Tahun 2024 dengan jumlah follower masih 73 pengikut, sehingga ada masyarakat yang belum tau keberadaan instagram tersebut hal ini dibuktikan masyarakat mengetahui informasi E-Catalogue ini berasal dari kerabat atau teman mereka sendiri hal ini juga terlihat di instagram milik DISKOPERINDAG yang hanya memposting dokumentasi kegiatan tidak dengan informasi yang dibutuhkan bagi masyarakat terkait penggunaan E-Catalogue. Selain itu juga terdapat youtube sebagai alat bantu bagi pengguna apabila masih kesulitan dalam penerapan E-Catalogue karena terdapat video tutorialnya, hal ini sering kali di sampaikan dari pegawai ke pengguna LPSE untuk memudahkan mereka dalam memberikan bantuan kendala dalam penerapan E-Catalogue, namun dalam hal ini informasi tentang youtube ini hanya disampaikan apabila ada kunjungan ke kantor BPBJ atau sosialisasi sementara tidak ada tautan link youtube di instagram atau website LPSE.

Kemudian Website LPSE Gresik menyediakan platform bagi UMKM untuk mengakses informasi secara elektronik, termasuk dokumen, persyaratan, dan proses pengajuan petunjuk serta kontak yang bisa dihubungi. Hal ini mempermudah UMKM dalam mendaftarkan diri dan mengikuti proses penerapan E-Catalogue. Upaya penyediaan informasi yang komprehensif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kemudahan bagi UMKM dalam mengakses E-Catalogue dan mendorong partisipasi mereka dalam pengadaan barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003. Pemerintah harus transparan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memberikan informasi yang mudah dipahami tentang biaya, persyaratan, prosedur, dan lain sebagainya. Masyarakat juga harus difasilitasi dengan saluran untuk memberikan masukan dan pengaduan terkait pelayanan yang diterima. Dalam hal ini juga sudah sesuai dengan teori dari Rianto dan Lestari (dalam Herman and Fanida 2023) bahwa data dan informasi merupakan bahan utama dalam proses e-government untuk mendukung penyebaran informasi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk di evaluasi.

Berdasarkan dari pemaparan diatas mengenai indikator dari (Indrajit 2019) yaitu dialokasikannya segala sejumlah sumber daya sudah baik dijalankan dalam memberikan segala

sumber daya yang dibutuhkan dalam penerapan E-Catalogue di Pemerintahan Kabupaten Gresik. Namun, masih terdapat ruang untuk diperbaiki, terutama dalam hal kualitas informasi perlu dilakukan agar manfaat E-Catalogue dapat dirasakan secara optimal oleh semua pihak. dalam hal ini untuk BPBJ masih belum terlalu aktif dalam media sosial Instagram karena berdasarkan pengamatan dari peneliti akun media sosial Instagram BPBJ Kabupaten Gresik masih baru di buat di tahun 2024, diharapkan dalam hal ini bisa ditingkatkan kualitas informasi yang diberikan melalui instagaram atau media sosial lain yang bisa ditingkatkan kembali karena seiring berkembang jaman media sosial juga menjadi suatu alat dalam membantu mencari akses informasi yang diperlukan. adapun upaya lain yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan Penerapan E-Catalogue Lokal di Kabupaten Gresik telah dilakukan oleh BPBJ Sekretariat Daerah dan Diskoperindag pada tahun 2022. Dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan UMKM lokal melalui platform E-Catalogue Lokal. Upaya ini dilakukan melalui kerjasama dengan OPD terkait, pelatihan, bimbingan, pendampingan, dan sosialisasi langsung di kecamatan-kecamatan. Meskipun demikian, sosialisasi E-Catalogue Lokal masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar OPD untuk melakukan sosialisasi yang belum menjangkau seluruh UMKM, yang dimana terakhir kali diadakan pada tahun 2022 dan setelahnya pihak BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Diskoperindag mereka melakukan soialiasi dengan bergerak secara sendiri sendiri yang dimanaPekab Gresik sejak awal 2023 gencar mensosialisasikan penggunaane-katalog lokal kepada pemerintah desa dan OPD untuk mendorong belanja anggaran melalui platform ini.

Di sisi lain Diskoperindag Gresik sejak Februari 2022 telah gencar mensosialisasikan NIB dan PIRT kepada UMKM dengan tujuan utama memfasilitasi produk UMKM untuk dipasarkan di tempat wisata dan Puduk Galery. dijelaskan bahwasanya Diskoperindag Lebih sering bekerja sama dengan pihak Dinas Perizinan dalam pembuatan NIB dan PIRT sementara BPBJ melakukan soisalisasi mandiri tentang menerapkan E-Catalogue dalam hal ini berdampak pada kurangnya pemahaman terkait persyaratan dan tata cara pendaftaran, dan keengganan UMKM untuk mendaftar karena kekhawatiran terkait pajak. Selain itu juga dalam kegiatan sosialis di tiap kecamatan waktu yang digunakan berkunjung di tiap kecamatan tidak terjadwal, karena tinggal menunggu konfirmasi di tiap kecamatan kemudian juga dalam kegiatan sosiliasinya tidak melulu melakukan pelatihan atau pendampingan secara langsung tapi hanya sekedar menyampaikan materi saja hal ini berakibat pada lambatnya peningkatan partisipasi dan pemahaman pelaku UMKM dalam menerapkan E-Catalogue. Berdasarkan pemaparan diatas jika dilihat dari teori Rianto Dan Lestari (dalam Herman and Fanida 2023) Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk

menyebarkan informasi terkait kebijakan e-government secara menyeluruh Masih belum berjalan baik, seperti kurangnya berkelanjutan sosialisasi bekerja sama anatar tingkat OPD dan belum menjangkau semua UMKM, hal ini juga diperkuat dari teori (indrajit 2019) Sosialisasi konsep e-government yang merata, berkelanjutan, konsisten, dan komprehensif kepada semua kalangan birokrat dan masyarakat secara umum perlu dilakukan melalui berbagai cara kampanye yang bersifat mengena. Dalam Hal ini bertujuan untuk membangun

pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaksana di daerah. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam implementasi e-government yang sukses. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang e-government, para pelaksana di daerah dapat menjalankan implementasi dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan komunikasi dan edukasi terkait e-government kepada seluruh pihak terkait.

Indikator selanjutnya mengenai dasar hukum menurut (indrajit 2019) Peraturan yang sesuai harus dibuat agar e-government dapat berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara observasi yang telah peneliti lakukan Penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik memiliki dasar hukum yang kuat dan kokoh, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menganut :

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa: Menetapkan peran dan tanggung jawab berbagai pihak dalam pengadaan barang dan jasa, termasuk PBJ. Dalam konteks E-Catalogue lokal, Perpres ini mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui platform E-Catalogue.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, dan Validasi Produk UMKM pada Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa: Mengatur tata cara pendaftaran, verifikasi, dan validasi produk UMKM untuk masuk ke dalam E-Catalogue. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk UMKM yang terdaftar memenuhi standar kualitas dan mutu yang ditetapkan.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Panduan teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan melalui E-Catalogue. Peraturan LKPP ini memuat berbagai ketentuan teknis, seperti spesifikasi teknis barang dan jasa, cara pembayaran, dan pengawasan.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Mendorong penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. E-Catalogue menjadi salah satu platform utama untuk mewujudkan Inpres ini.

Selain itu DISKOPERINDAG: Peraturan Bupati Gresik Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi: Mengatur tentang pemberdayaan UMKM dan koperasi di Kabupaten Gresik. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perdagangan Barang dan Jasa melalui Sistem Elektronik: Mengatur tentang penyelenggaraan perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik, termasuk E-Catalogue. Maka dalam penerapan E-Catalogue, Pemerintah Kabupaten Gresik tidak memiliki landasan hukum khusus di tingkat daerah dan berpedoman pada landasan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemkab Gresik diwajibkan untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terkait kebijakan terbaru, menurut (indrajit 2019). mengingat tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannya mengalami transformasi seiring dengan meningkatnya tekanan dari negara-negara besar untuk menerapkan nilai-nilai aspek-

aspek penting demokrasi seperti hak-hak individu, kepastian hukum, dan integritas pemerintahan.

Mengenai indikator Support (Indrajit, 2019) Penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen dan upaya yang baik dari pemerintah daerah untuk mendukung UMKM dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan arahan dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, berbagai upaya implementasi seperti sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM, serta hasil dan dampak positif yang terlihat seperti tingginya antusiasme UMKM dan harapan untuk mendorong penjualan produk dalam negeri dan memberdayakan UMKM. Walaupun masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diatasi untuk mencapai kesesuaian yang lebih optimal dengan indikator support (Indrajit, 2019), yaitu: Sosialisasi yang lebih berkelanjutan dan menjangkau seluruh UMKM., Koordinasi yang lebih kuat antar OPD terkait., Edukasi yang lebih intensif bagi UMKM., Layanan konsultasi yang mudah diakses. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut dan menerapkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik dapat lebih efektif dan mencapai target dalam meningkatkan partisipasi UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomilokal, dan meningkatkan daya saing UMKM di era digital.

2. Capacity

Dalam indikator Capacity Indrajit (indrajit 2019) merujuk pada kemampuan atau keberdayaan pemerintah setempat untuk mewujudkan impian e-government menjadi kenyataan. Disebutkan ada 3 aspek yaitu Ketersediaan Sumber daya finansial, infrastruktur yang memadai dan juga sumber daya manusia yang kompeten.

Diketahui dalam Sumber daya finansial Pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini sudah memadai dalam menggelontorkan dana untuk mensukseskan penerapan E-Catalogue Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan utama, dengan kemungkinan adanya tambahan dana dari dalam APBN. Besaran anggaran ditentukan berdasarkan rencana pembangunan daerah. Di tahun 2024 ini yang dimana dari pihak BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik upaya kegiatannya dalam pengelolaan layanan katalog electronic dan pembinaan dan advokasi barang jasa selain itu juga Diskoperindag dalam memberikan upaya kegiatan pemberdayaan terhadap penyedia atau pelaku umkm dengan menggandeng pihak Dinas Perizinan dalam hal pembuatan NIB dan PIRT yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik. Dalam hal ini sejalan dengan sebagaimana disampaikan oleh (Permata 2020) anggaran yang memadai diperlukan untuk mendanai proyek e-government. Begitu juga (Indrajit, 2019) mengungkapkan bahwa Ketersediaan sumber daya finansial yang memadai merupakan elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan proyek e-Government.

Kemudian infrastruktur teknologi informasi Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah memadai untuk mendukung penerapan e-government. Hal ini dibuktikan dengan beberapa indikator, yaitu: Ketersediaan komputer dan ruangan bagi penyedia pengguna E-Catalogue: BPBJ menyediakan beberapa tempat untuk konsultasi dan rapat, serta komputer yang dapat digunakan oleh penyedia yang kurang terampil dalam teknologi (gaptek) atau tidak memiliki perangkat pribadi. Persepsi positif dari pengguna E-Catalogue Para penyedia yang diwawancarai menyatakan bahwa sarana prasarana yang disediakan BPBJ sudah

memadai dan membantu mereka dalam menggunakan E-Catalogue. Secara keseluruhan, BPBJ telah menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Namun masih terdapat keluhan terakit server down yang menghambat para pelaku UMKM untuk mendaftarkan dan menayangkan produk dikarenakan pembaruan website yang belum selesai kemudian fitur aplikasi E-Catalogue dari masyarakat yang tidak user friendly dan belum ada pembaruan terkait pendaftaran online yang terkait verifikasi data yang masih manual harus datang ke kantor terlebih dahulu meskipun penting, tapi dalam hal ini masih belum efektif bagi masyarakat yang jarak rumahnya jauh dari kantor, berdasarkan hasil wawancara masih belum ada pembaharuan terkait verifikasi data sehingga perlu ada pengembangan di dalam aplikasi E-Catalogue dalam verifikasi data secara online dan langsung melalui aplikasi.

Kemudian pada metode pembayaran menggunakan tunai dan non tunai dengan mengecek dahulu dokumen2 penting untuk verifikasi pembayaran dirasa dalam hal ini sangat baik untuk dilakukan mengingat penggunaan aplikasi E- Catalogue ini bersifat transparansi dan akuntabel . Hal ini didukung dengan pemikiran dari (Permata 2020) Teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam e-government. Dan diperkuat juga teori dari (Indrajit, 2019) bahwa Memiliki fasilitas infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan faktor keberhasilan penerapan konsep e-Government, selain itu di jelaskan dalam prinsip prinsip pelayanan public Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 bahwasannya Kejelasan persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran. Dan harus bersifat transparan juga akuntabel.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan BPBJ telah menunjukkan komitmennya dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. Merupakan hal penting dalam penerapan e-government. Dengan infrastruktur yang memadai, E-Catalogue di Kabupaten Gresik diharapkan dapat Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta Mempermudah UMKM untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun begitu Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi infrastruktur teknologi informasi E-Catalogue agar dapat terus dioptimalkan.

Selanjutnya terkait dengan Sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini Implementasi E-Catalogue di Kabupaten Gresik menunjukkan pemahaman yang baik tentang pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan adaptif dalam mencapai kesuksesan e-government (Indrajit, 2019) hal ini juga sejalan dengan teori (Permata 2020) sumber daya manusia yang kompeten dan terampil, sehingga penerapan e-government dapat sesuai dengan prinsip manfaat yang diharapkan.

Hal ini dibuktikan dengan pelatihan dan tugas yang diberikan kepada staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik selaku Operator Pelayanan E-Catalogue di Kabupaten Gresik, serta pemahaman E- Catalogue yang dimiliki oleh beberapa staf DISKOPERINDAG. Hal ini juga didukung oleh teori dari (Permata 2020) bawa Keterampilan pengguna dan kemudahan penggunaan aplikasi juga menjadi faktor penting. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan

diperlukan untuk memaksimalkan manfaat e-government bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan E- Catalogue di Kabupaten Gresik menunjukkan kesesuaian dengan teori Capacity Indrajit (2019) dalam beberapa aspek: Infrastruktur Teknologi Informasi, BPBJ menyediakan komputer dan ruang yang memadai untuk pengguna E-Catalogue. Pengguna E-Catalogue memiliki persepsi positif terhadap infrastruktur yang disediakan, dan Ketersediaan infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran proses e-government. Kemudian Sumber Daya Manusia, BPBJ Gresik telah memberikan pelatihan kepada staf untuk mengoperasikan E-Catalogue. DISKOPERINDAG memiliki pemahaman dasar tentang E-Catalogue. Upaya- upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung penerapan e-government. Hal ini sejalan dengan teori Capacity (Indrajit, 2019) yang menekankan pentingnya SDM yang kompeten dan adaptif dalam mencapai kesuksesan e-government.

3. Value

Dalam indikator value menurut Indrajit (2019) Melihat manfaat E-Catalogue yang dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan E- Catalogue memiliki berbagai manfaat terutama bagi masyarakat sebagai penerimalayanan.

Berdasarkan hasil analisis wawancara observasi yang peneliti lakukan E-Catalogue lokal di Gresik dirancang untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka secara lebih luas dan meningkatkan akses mereka terhadap peluang bisnis. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM lokal.luas, menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan akses dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dengan upaya ini, diharapkan E-Catalogue tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi UMKM di Kabupaten Gresik. BPBJ Gresik menyadari adanya kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara penggunaan E-Catalogue, dan telah melakukan upaya untuk mengatasinya, seperti sosialisasi, edukasi, dan layanan pendampingan. BPBJ Gresik menyediakan berbagai layanan untuk membantu masyarakat dalam menggunakan E-Catalogue, seperti helpdesk, informasi melalui media sosial, dan akses layanan di kantor BPBJ dan Mall Pelayanan Publik. selama pelaksanaannya juga BPBJ Sekretariat Daerah kabupaten Gresik selaku operator pelayanan E-Catalogue terbuka untuk menerima saran, kritik dan masukan dari masyarakat dengan menyediakan barcode Survei Kepuasan Masyarakat yang disediakan di dalam kantor dan instagram.

Upaya BPBJ Gresik dalam memberikan pelayanan terbaik mendapatkan respon positif dari masyarakat, terutama terkait sarana prasarana dan kehandalan pegawai dalam mengenal E-Catalogue. hal ini sejalan dengan teori dari Rianto & Lestari (Dapat ditarik kesimpulan dalam Penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen dan upaya yang baik dari pemerintah daerah untuk mendukung UMKM dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan arahan dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, berbagai upaya implementasi seperti waktu pelaksanaan penggunaan aplikasi sudah baik dengan didukung sarana prasarana ruang praktek bagi pelaku umkm, namun pada proses verifikasi data masih dilakukan secara offline yang memakan waktu hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Jam kerja kantor yang terbatas membuat pelaku

UMKM harus menyesuaikan jadwal mereka.

Sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM dirasa kurang baik dikarenakan tidak berkelanjutan melakukan kerja sama antar OPD dalam mensosialisasikan penerapan E-Catalogue yang terjadi terakhir pada Tahun 2022. Setelah tahun 2022, proses sosialisasi dilakukan secara mandiri tiap OPD di tiap kecamatan sehingga informasi yang di terima masyarakat tidak cukup.

Kemudian juga terkait penyebaran informasi melalui platform media social instagram kurang baik di karenakan BPBJ baru membuat akun instagram Tahun 2024 sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui adanya informasi melalui instagram tersebut ditambah lagi dengan adanya youtube memuat video tutorial tapi tidak ada tautan link tambahan di instagram, begitu pun juga dari pihak DISKOPERINDAG tidak memberikan informasi mengenai E-Catalogue melainkan hanya sebuah dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan. (Herman and Fanida 2023)Kepuasan pelanggan terhadap produk e-government, mulai dari pusat data hingga aplikasi pelayanan publik, dapat menjadi indikator keberhasilan penerapan e-government. Implementasi E-Catalogue di Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, sejalan dengan pemikiran (Indrajit, 2019) tentang pentingnya meninjau aspek yang dilihat dari sudut pandang penerima layanan atau masyarakat.

Penutup

1. Support

Dapat ditarik kesimpulan dalam Penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik telah menunjukkan komitmen dan upaya yang baik dari pemerintah daerah untuk mendukung UMKM dan meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan arahan dan dukungan penuh dari pimpinan daerah, berbagai upaya implementasi seperti waktu pelaksanaan penggunaan aplikasi sudah baik dengan didukung sarana prasarana ruang praktek bagi pelaku umkm, namun pada proses verifikasi data masih dilakukan secara offline yang memakan waktu hal ini tentu menyulitkan masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Jam kerja kantor yang terbatas membuat pelaku UMKM harus menyesuaikan jadwal mereka.

Sosialisasi dan pelatihan bagi UMKM dirasa kurang baik dikarenakan tidak berkelanjutan melakukan kerja sama antar OPD dalam mensosialisasikan penerapan E-Catalogue yang terjadi terakhir pada Tahun 2022. Setelah tahun 2022, proses sosialisasi dilakukan secara mandiri tiap OPD di tiap kecamatan sehingga informasi yang di terima masyarakat tidak cukup.

Kemudian juga terkait penyebaran informasi melalui platform media social instagram kurang baik di karenakan BPBJ baru membuat akun instagram Tahun 2024 sehingga masih banyak masyarakat belum mengetahui adanya informasi melalui instagram tersebut ditambah lagi dengan adanya youtube memuat video tutorial tapi tidak ada tautan link tambahan di instagram, begitu pun juga dari pihak DISKOPERINDAG tidak memberikan informasi mengenai E-Catalogue melainkan hanya sebuah dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Capacity

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan E- Catalogue di

Kabupaten Gresik sudah sesuai dalam beberapa aspek Sumber Daya Finansial Anggaran yang memadai telah dialokasikan untuk mendukung implementasi E-Catalogue.

Infrastruktur Teknologi Informasi, BPBJ menyediakan komputer dan ruang yang memadai untuk pengguna E-Catalogue. Pengguna E-Catalogue memiliki persepsi positif terhadap infrastruktur yang disediakan, dan Ketersediaan infrastruktur yang memadai mendukung kelancaran proses e-government namun masih ditemukan kejanggalan terdapat keluhan terakit server down yang menghambat para pelaku UMKM untuk mendaftarkan dan menayangkan produk dikarenakan pembaruan website yang belum selesai didalam website belum ada pembaruan fitur verifikasi secara online sehingga Pengguna harus melakukan verifikasi secara manual, misalnya dengan datang langsung ke kantor atau mengirimkan dokumen fisik. Hal ini tentu saja akan memakan waktu dan tenaga, alangkah baiknya pendaftaran dilakukan secara melalui system sehingga data langsung bisa dimasukkan dan praktis tanpa perlu datang ke kantor dan memudahkan. kemudian menu daftar produk yang menyulitkan pelaku UMKM dalam memasukan produk mereka, kesulitan ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis UMKM, karena mereka tidak dapat menjangkau pasar yang lebih luas secara online. Serta server down akibat pembaruan aplikasi yang belum selesai. Serta tidak adanya Survei Kepuasan Masyarakat di dalam website menyebabkan masalah- masalah yang timbul dalam penggunaan E-Catalogue tidak dapat teridentifikasi dan diselesaikan dengan cepat. Hal ini dapat menyebabkan pengalaman pengguna menjadi buruk dan menurunkan kepuasan mereka..

Kemudian Sumber Daya Manusia, BPBJ Gresik telah memberikan pelatihan kepada staf untuk mengoperasikan E-Catalogue. dan di pihak DISKOPERINDAG memiliki pemahaman dasar tentang E-Catalogue. Upaya-upaya tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung penerapan e-government. pentingnya SDM yang kompeten dan adaptif dalam mencapai kesuksesan e-government.

3. Value

Penerapan E-Catalogue di Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya yang dilakukan oleh BPBJ Gresik untuk mengatasi kendala dan memberikan pelayanan terbaik Dengan terus meningkatkan layanan E-Catalogue dan mengatasi kendala-kendala yang ada dengan adanya akses survey kepuasan masyarakat yang ada di dalam kantor dan instagram diharapkan manfaat E-Catalogue dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya namun berkaitan dengan.

b. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi penelitian, berikut beberapa saran dan rekomendasi untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Gresik dalam melaksanakan Penerapan E-Catalogue di Pemerintahan Kabupaten Gresik:

- a. Perlu diperkuat untuk mencapai kesesuaian yang lebih optimal yaitu: di perlukan sosialisasi simulasi pendaftaran di kecamatan kecamatan bagi para pelaku UMKM.
- b. BPBJ harus sering mengupdate informasi dan memasukkan link youtube padasocial media dan ke website untuk memudahkan para pelaku UMKM mengakses informasi.

- c. Dilakukan Maintenance website berupa mempermudah fitur dan menu agar mempermudah bagi pelaku UMKM dan pengguna untuk mengakses E- Catalogue. Selain itu, perlunya pembaruan terhadap server dan penambahan kapasitas bandwidth meminimalisir terjadinya server down. Perlu adanya pembaruan aplikasi E-Catalogue terkait proses verifikasi NPWP, KTP, NIB untuk bisa dilakukan secara langsung melalui aplikasi E-Catalogue di masa yang akan datang.
- d. Dalam hal ini untuk tetap selalu melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap E-Catalogue dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi ini, diharapkan Penerapan E- Catalogue di Pemerintahan Kabupaten Gresik beroperasi secara lebih baik dan optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi UMKM dan perekonomian lokal.

Referensi

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Eman, Freely Trinny, Ismail Rachman, and Fanley N Pangemanan. 2023. "Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Manado." 3(1): 1–10.
- Herman, Berlinda Shilvana, and Eva Hany Fanida. 2023. "Implementasi Electronic Government Pada Aplikasi Sistem Informasi Guru Tulungagung Belajar (Sigutajar)Di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tulungagung." *Publika*: 2477–90. doi:10.26740/publika.v11n4.p2477-2490.
- indrajit, Richardus Eko. 2019. *Elektronik Government*. Jakarta: PREINEXUS.
- Marwarni Mega, Gamaputra Gading, and Meilinda Selvi Diana. 2020. "Penerapan Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa Aplikasi E-Purchasing Dan E-Katalog." *Wacana Publik* 14(02): 81–92.
- Muliawaty, L, and S Hendryawan. 2020. "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)." *Kebijakan: Jurnal Ilmu* ... 11: 101–12. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>.
- Permata, Julia. 2020. "E-Government Dan e-Procurement." : 1–51.
- Suryono, Ahmad, Yeni Dwi Rahayu, Milang Akbar Winasis, and M Faiz Nailil Murod. 2021. "E-Katalog Dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Community Development* 2(2): 66–69. doi:10.47134/comdev.v2i2.33.
- Syahza, Almasdi, and Universitas Riau. 2021. *Buku Metodologi Penelitian , Edisi Revisi Tahun 2021*.
- Ulut, N. G. R., P. Y. Amitran, and C. C. Foenay. 2023. "Analisis Pemberdayaan Umkm Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal Di Wilayah Lintas Batas Atambua-Timor Leste." *Hurnal Ekonomi & Ilmu Sosial* 4(5): 1171–86. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/11687%0Ahttps://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/download/11687/5770>.

Website

- Badan Pusat Statistika. 2024. "Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen." <https://webapi.bps.go.id/cover.php?f=+i93C7G6Jc2tCQb+U0yweFBBDU3RJOVoze>

mVJNXhpNVF5QkVpOHVPNGhVK05mbytORVFNRkVoR21rT2Q5YlIBRi9G
ZF
NmU05ZeGgrRkd6QkdiZHNWU2tqQjM3Tkg5dy82NkNuUIJtU0o2VTdidytWbU
RNQXQ0WnFHRCtUc1F6NVE5ZFppUmxnSGJ0OXMydktt&_gl=1*1y10148*_
ga
*NTUxNjg (June 10, 2024).